

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1. Beberapa Konsep dan Teori Pembangunan Daerah

Secara teoritis, perekonomian atau pembangunan daerah berbeda dengan pengertian pembangunan pada umumnya. Perbedaan yang nyata disini pada aspek spesial yang berkaitan dengan daerah tempat aktivitas ekonomi dan pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga pengertian daerah menjadi sangat penting dalam setiap permasalahan tentang pembangunan daerah. Pengertian daerah itu sendiri dapat dibedakan dalam tiga pengertian sebagai berikut (Sukirno, 1981):

- 1). **Konsep Homogenous Region**, dalam konsep ini daerah dianggap sebagai suatu *space* atau ruang yang mempunyai persamaan sifat baik dari segi pendapatan per kapita penduduknya, segi agama atau suku bangsa masyarakatnya ataupun dari segi struktur ekonominya .
- 2). **Konsep Nodal Region**, dalam konsep ini diartikan bahwa daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi .
- 3). **Konsep Administrative Region**, dalam konsep ini daerah diartikan berdasarkan pembagian administratif dari suatu negara seperti propinsi, kabupaten, desa dan sebagainya.

Dalam konteks pembangunan daerah dikenal pula tiga pendekatan utama diluar pendekatan yang digunakan kalangan Marxis. **Pertama**, pendekatan marjinalis yang menelaah isu regional melalui prinsip keseimbangan ekonomi Neo Klasik. Pendekatan ini menekankan pentingnya alokasi sumber-sumber daya melalui pasar, dan memandang ketimpangan regional sebagai suatu gejala transisi. Melalui

pembangunan ekonomi dan integrasi faktor pasar, maka ketimpangan regional dapat dikurangi. Suatu keseimbangan tercapai, yang setelah diamati secara tajam ternyata analog dengan hasil keseimbangan dalam model penentuan harga dari ilmu ekonomi Neo Klasik (lihat *Wilmoth, 1978*).

Kedua, adalah pendekatan institusionalis. Pendekatan ini mengakui adanya kecenderungan ke arah ketimpangan spasial dalam jalannya pasar kapitalis berdasarkan prinsip seperti penyebab sirkuler dan kumulatif misalnya. Pendekatan ini menyebutkan, bahwa sekali ketimpangan regional berkembang, jalannya pasar, migrasi modal serta buruh khususnya cenderung tidak mengurangi ketimpangan. Sebaliknya dari ramalan umum ilmu ekonomi Neo Klasik, setiap kecenderungan ke arah ketimpangan regional diatasi oleh kecenderungan tandingan yang kuat ke arah keseimbangan (lihat *Stilwell, 1978*). Ahli-ahli ekonomi regional yang termasuk dalam pendekatan ini adalah Hirschman, Myrdal, Perroux dan Friedman.

Ketiga, adalah pendekatan difusionis. Pendekatan yang dilukiskan dengan geografi riset modernisasi ini mempunyai makna tertentu. Penekanan teori modernisasi terletak pada difusi pertumbuhan spasial yang menghasilkan inovasi di seluruh ruang perekonomian dari pangkalan terdepan semula (lihat *Ede, 1978*).

Berdasarkan pengamatan ahli ekonomi regional diperoleh bukti empiris bahwa industri-industri di negara-negara yang berada pada tahap awal pembangunan mempunyai kecenderungan untuk berkumpul di suatu wilayah tertentu (*Richardson, 1978*). Fenomena tersebut merupakan kenyataan yang terjadi di sebagian besar NSB. Adanya pengumpulan atau konsentrasi industri-industri di suatu wilayah akan cenderung mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah di negara tersebut,

sehingga ketimpangan antar wilayah ini merupakan fenomena yang umum yang terjadi di sebagian besar NSB.

Williamson (1965) mengemukakan adanya beberapa faktor penyebab dari ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, yaitu sebagai berikut :

- 1). ***Migrasi Tenaga Kerja*** : migrasi tenaga kerja antar wilayah (*inter regions*) sangat selektif. Hal ini disebabkan oleh adanya halangan dari biaya yang begitu besar yang dibutuhkan untuk melakukan migrasi serta adanya pengaruh budaya dan norma tradisional di daerah non urban yang miskin. Karakteristik migran yang ada adalah pada golongan usia produktif yang mempunyai skill terdidik. Pada akhirnya migrasi tenaga kerja antar wilayah akan memberikan efek disequilibrium yang menguntungkan bagi daerah atau wilayah yang kaya. Hal inilah yang menyebabkan semakin besarnya ketimpangan spasial .
- 2). ***Migrasi Kapital*** : aliran kapital antar daerah atau wilayah akan cenderung berakibat jelek. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari adanya aglomerasi proyek-proyek kapital dari daerah kaya yang mungkin menyebabkan mengalirnya kapital dari daerah miskin menuju ke daerah kaya. Hal ini pada dasarnya akan menyebabkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar .
- 3). ***Kebijakan Pemerintah*** : kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan nasional akan cenderung menyebabkan ketimpangan antar daerah. Biasanya pemerintah pusat akan mengalokasikan investasinya ke daerah kaya yang membutuhkan bermacam-macam investasi kapital publik dengan segera, sehingga menimbulkan pertumbuhan industri yang cepat. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kaya semakin cepat, sementara daerah miskin

relatif lebih lambat pertumbuhannya, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah .

4). **Keterkaitan Antar Daerah** : kurangnya keterkaitan antar daerah pada akhirnya akan menyebabkan kurangnya efek penyebaran, perubahan sosial dan penggandaan pendapatan (*income multiplier*). Kondisi ini semakin buruk apabila daerah yang kaya juga mempunyai areal pertanian yang luas dan bersifat produktif, sehingga daerah miskin semakin tidak mendapat keuntungan dari adanya hubungan perdagangan dengan daerah kaya. Hal ini disebabkan karena daerah kaya mampu memenuhi sendiri input-input untuk kebutuhan industrinya. Daerah miskin akhirnya hanya memperoleh efek yang tidak menguntungkan berupa polarisasi.

Disamping itu, Williamson (1965) juga menyebutkan bahwa kondisi geografis suatu negara juga dapat menjadi penyebab sekunder dalam masalah ketimpangan yang semakin besar. Semakin besar dan luas suatu wilayah maka akan semakin lemah dan lambat efek penyebarannya. Kenyataan ini diperparah lagi bila kurang terdapat sarana transportasi yang memadai. Untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan antar daerah para ahli ekonomi regional menyarankan beberapa konsep atau pendekatan. Perroux (1953), mencoba mengembangkan konsep atau teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*) yang bertujuan untuk mengembangkan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Pengembangan daerah lain disini dapat berupa pembentukan simpul atau kutub-kutub pertumbuhan baru di daerah-daerah yang masing tertinggal tersebut.

Hakekat dari teori pusat pertumbuhan ini adalah bahwa di dalam proses pembangunan akan muncul industri-industri pemimpin (*leading industries*) yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu

daerah di mana letaknya cenderung untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga pusat-pusat pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah lain yang lebih lambat perkembangan industrinya (Sukirno, 1981).

Suatu pusat pertumbuhan dalam versi teori Perroux dapat didefinisikan sebagai seperangkat industri yang mampu membangkitkan pertumbuhan dinamis dalam perekonomian suatu daerah di mana industri-industri tersebut berhubungan dengan daerah sekitarnya melalui ikatan dan pola hubungan input-output. (Richardson, 1978). Teori ini kemudian berkembang dan semakin sempurna setelah muncul konsep atau teori baru dari Myrdal, Hirschman dan Boudeville .

Pendekatan teoritis dari Myrdal (1957) menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Pengertian *backwash effect* adalah faktor-faktor yang menyebabkan mengalirnya dan mengumpulnya faktor-faktor produksi dari daerah kurang maju ke daerah yang relatif lebih maju. *Spread effect* adalah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terpecahnya hasil-hasil pembangunan dari daerah maju ke daerah kurang maju, sehingga pembangunan di daerah maju akan dapat menjadi penggerak dan pemacu dalam pembangunan di daerah kurang maju. Selisih antara *backwash effect* dan *spread effect* disebut *net spillover effect*

Seperti Myrdal, Hirschman (1966) juga berpendapat bahwa terkonsentrasinya pembangunan di suatu daerah disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul di daerah maju yang akan menghambat dan mempengaruhi pembangunan daerah kurang maju. Adanya faktor tersebut oleh Hirschman disebut sebagai

polarization effect, sedangkan faktor-faktor dari daerah maju yang memacu pembangunan daerah yang kurang maju disebut sebagai *trickle down effect*.

Sementara itu, Boudeville (1966) mencoba menyempurnakan dan mengembangkan teori pusat pertumbuhan menjadi konsep yang baru. Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dinyatakan dalam konsep Boudeville tersebut yaitu :

- 1). Seperangkat industri dinamis mungkin dapat dikumpulkan secara spasial .
- 2). Dengan menghubungkan pengelompokan industri ini dengan lokasi dalam suatu areal perkotaan .
- 3). *Spillover effect* harus ditujukan kepada daerah buritan (*hinterland*) yang mengelilingi pusat pertumbuhan.

Dari ilustrasi di atas tampak seolah-olah teori pusat pertumbuhan ini merupakan suatu teori yang benar-benar ampuh dan senantiasa dapat digunakan untuk memecahkan masalah ketimpangan antar wilayah atau daerah. Namun, sebenarnya terdapat suatu kelemahan utama dari teori pusat pertumbuhan ini yang perlu diperhatikan bilamana teori ini diterapkan dalam pemecahan masalah ketimpangan pembangunan di NSB .

Di satu pihak, pembentukan simpul pertumbuhan tentu saja akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada simpul baru itu sendiri. Tetapi di lain pihak, dengan semakin majunya simpul pertumbuhan tersebut maka daerah di sekitar simpul pertumbuhan tersebut justru akan menjadi semakin miskin, di mana laju kemiskinan daerah-daerah tersebut biasanya lebih cepat daripada laju pertumbuhan di simpul-simpul pertumbuhan baru. Dengan kata lain, *backwash effect* terjadi dalam kasus ini. Kesimpulannya, simpul pertumbuhan yang baru telah

gagal untuk menciptakan *net spillover effect* yang positif yang diharapkan dapat diterima daerah di sekitar pusat pertumbuhan (*daerah hinterland*).

Ilustrasi mengenai proses perkembangan suatu daerah pertama kali dikemukakan oleh Hoover dan Fisher yang membagi perkembangan daerah menjadi lima tahap (North, 1970): *Pertama*, tahap dimana produksi daerah tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Pada tahap ini perdagangan dan investasi relatif sangat kecil volumenya. *Kedua*, tahap dimana mulai terdapat perbaikan sarana transportasi serta adanya perkembangan perdagangan dan ada spesialisasi lokal dalam kegiatan produksi. *Ketiga*, pada tahap ini mulai terdapat perdagangan antar daerah dan terdapat kecenderungan untuk mengganti cara-cara pertanian dari ekstensifikasi menuju ke arah intensifikasi. *Keempat*, pada tahap ini terjadi pengurangan sektor primer yang disertai dengan adanya penambahan penduduk yang tinggi dan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor-sektor sekunder. *Kelima*, pada tahap ini sektor tersier mempunyai peranan yang dominan dalam perekonomian dengan ditandai adanya usaha mengeksport produk-produknya.

2.2. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah¹

Teori pembangunan yang ada sekarang ini (seperti yang diuraikan di muka) tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan

¹ Bersumber pada Arsyad (1996)

kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini dapat disajikan pada tabel 2. 1. berikut ini :

Tabel 2. 1
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = Semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengem- bangkan pekerjaan yang sesuai dengan "kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga- lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan Kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai Pembangkit Ekonomi

Sumber: Arsyad (1996)

2.3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah²

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk

² Dikutip dan diringkas dari Arsyad (1996)

memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab .

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta - petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial - harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Setelah para ahli, terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di NSB, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Tentu timbul pertanyaan : sampai sejauh mana campur tangan tersebut ?

Berkenaan campur tangan pemerintah (baca : perencanaan) untuk mendorong perkembangan daerah-daerah miskin sampai pada saat ini masih ada dua pendapat yang saling bertentangan, dalam arti ada yang setuju dan ada yang menentang. Alasan dari kelompok yang kurang setuju atau menolak campur tangan pemerintah terhadap pembangunan daerah adalah :

1. Kelompok ini masih tetap percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah .
2. Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi apabila ditinjau secara keruangan dan kewilayahan. Sebab dengan usaha membangun daerah terbelakang akan mengorbankan potensi pembangunan yang lebih besar yang justru banyak terdapat di daerah maju. Untuk membangun daerah terbelakang pemerintah harus membelanjakan uang yang jumlahnya cukup banyak untuk membiayai pembangunan prasarana di daerah. Tindakan seperti itu merupakan penghamburan dana pembangunan dan sekaligus menghambat pembangunan, karena sebenarnya dengan dana tersebut dapat dilakukan pembangunan yang lebih baik jika dana itu digunakan untuk membangun daerah-daerah yang sudah maju yang sudah didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih banyak sehingga dana yang ada tidak digunakan secara efisien dan optimal.
3. Tindakan seperti itu dianggap seperti "membantu yang gagal dan menghukum yang sukses". Artinya supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usahanya di daerah terbelakang, pemerintah harus memberikan banyak bantuan dan fasilitas, mengingat daya tarik daerah yang masih rendah, tingkat keuntungan yang masih rendah dan harus membiayai pembangunan berbagai prasarana yang dibutuhkan. Dana yang dipakai tersebut sebetulnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak, jika dana itu diberikan kepada daerah-daerah maju .

Di pihak lain kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapat-pendapat yang mendukung gagasan mereka, yakni :

1. Bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yang terbelakang dengan akibat, keseluruhan wilayah negara tidak berkembang secara harmonis .
2. Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba (*trial and error*). Pengusaha tidak selalu mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga tidak semua keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien. Secara teoritis akhirnya akan dapat diambil keputusan yang tepat akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain mekanisme pasar belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi .
3. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah, sehingga kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, jika daerah tersebut sudah dapat berkembang dan bekerja secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah .
4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah di masa yang akan datang. Proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah sebagai akibat adanya campur tangan pemerintah, akan mendorong pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian mendorong adanya ekspansi kegiatan ekonomi pada berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan seperti itu di samping membantu pembangunan daerah yang terbelakang, sekaligus dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sudah maju .

5. Tujuan pembangunan bukan hanya semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang bersangkutan akan mengalami kesesakan yang dapat menimbulkan banyak masalah, terutama masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi jika proses pembangunan tidak terpusat hanya pada satu daerah, melainkan tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi kecepatan perkembangan di daerah-daerah maju, dengan akibat dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang akan dihadapi di kemudian hari. Pembangunan daerah di samping dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah, di pihak lain karena penduduk tidak lari ke daerah-daerah lain, mereka dapat mengembangkan kebudayaan yang ada .

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap.

2.4. Ukuran-Ukuran dan Model Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi (*economic linkage*) pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah .

2.4.1. Analisis Shift Share.

Analisis ini merupakan model disagregstif yang mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu, pertama, untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kedua, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan suatu sektor. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bawa pertumbuhan industri dalam satu wilayah mempunyai hubungan yang erat dengan (*Henings 1977*):

1. pertumbuhan industri yang sejenis di seluruh negara (nasional)
2. Pertumbuhan semua industri di secara nasional.
3. Pertumbuhan semua industri di daerah yang bersangkutan.

Untuk memudahkan analisa maka pertumbuhan industri dibuat menjadi beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (*Henings, 1977*):

A. *Fungsi Regional Share Component* : fungsi ini mencatat pertumbuhan tenaga kerja atau output yang diharapkan di mana tingkat pertumbuhan suatu industri pada suatu daerah besarnya sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$RS = (EEr_{i.o} \cdot EEEr_{i.t} / EEEr_{i.o}) - EEr_{i.o}$$

dimana:

RS = *regional share component*.

$EEr_{i.o}$ = jumlah tenaga kerja atau output industri i di daerah r pada waktu ke o .

$EEEr_{i.o}$ = jumlah total tenaga kerja atau output di daerah r pada waktu ke o .

$EEEr_{i.t}$ = jumlah total tenaga kerja atau output di daerah r pada waktu ke t .

B. Fungsi Proportionality Shift or Industry Mix Component : fungsi ini mencatat pertumbuhan suatu industri yang dominan di suatu daerah tersebut yang berada di atas pertumbuhan rata-rata sehingga diharapkan tingkat pertumbuhan daerah tersebut lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan rata-rata nasional. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$PS = (EEr_{i.o} \cdot EEr_{i.o} / EEr_{i.o}) - (EEEr_{i.t} / EEEr_{i.o})$$

dimana:

$EEr_{i.t}$ = jumlah tenaga kerja atau output industri i di daerah r pada waktu ke t .

C. Fungsi Differential Shift: fungsi ini mencatat pertumbuhan ekstra yang mungkin terjadi di suatu daerah karena tenaga kerja di daerah tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan rata-rata nasional. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$DS = E \{ Er i.t - Er i.o (EEr i.t / EEr i.o) \}$$

Dari persamaan-persamaan di atas maka besarnya pertumbuhan suatu daerah, misalnya r dari periode o sampai dengan periode t adalah :

$$\begin{aligned} g &= RS + PS + DS \\ &= EEr i.t - EEr i.o \end{aligned}$$

Besarnya *Total Shift Component* dapat ditulis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} TS &= PS + DS \\ &= EEr i.t - EEr i.o (EEEr i.t / EEEr i.o) \end{aligned}$$

Kelemahan dari *Analisis Shift-Share* ini adalah tidak adanya penjelasan tentang adanya perbedaan tingkat pertumbuhan antar industri, tidak dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan antar daerah serta hasilnya tidak dapat diuji secara statistik. Kelebihan yang dimilikinya adalah dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh timbal-balik antara pertumbuhan suatu sektor pada suatu daerah dengan pertumbuhan perekonomian nasional .

2.4.2. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Study*)

Teori ini mempunyai ide dasar bahwa suatu daerah pasti mempunyai satu atau lebih kegiatan ekonomi (*kegiatan basis*) yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Kegiatan basis dapat diidentifikasikan sebagai kegiatan yang mendatangkan uang bagi daerah lain dengan jalan memproduksi barang untuk

diekspor. Pengertian ekspor disini tidaklah berarti hanya berupa penjualan barang ke daerah atau negara lain melainkan juga termasuk penjualan barang-barang kepada orang daerah lain yang berada di daerah tersebut. Dasar teori basis ekonomi ini pertama kali dikemukakan oleh Homer Hoyt (lihat *Glickman, 1977; Isaard, 1969*) dan kemudian dikembangkan oleh Douglass C. North (1970) sebagai upaya untuk mengkritik pendapat Hoover dan Fisher. Menurut North (1970), tahap-tahap yang dikemukakan oleh Hoover dan Fisher mempunyai kelemahan yaitu kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi di berbagai daerah serta tidak dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan suatu daerah. Dalam konteks ini pula, sebagai alternatif North mengajukan teorinya mengenai peranan ekspor.

Menurut teori ini laju perkembangan daerah sangat ditentukan oleh perkembangan sektor ekspornya. Perkembangan ekspor suatu daerah akan menciptakan permintaan terhadap faktor-faktor produksi lokal (*residential industries*) yaitu industri-industri di daerah tersebut yang produksinya terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar daerah itu sendiri. Dengan demikian apabila sektor ekspor berkembang terus menerus maka perekonomian daerah tersebut juga akan selalu mengalami perkembangan. Besarnya multiplier pengaruh kenaikan ekspor (*sektor basis*) terhadap perekonomian adalah didapatkan dengan membagi kenaikan pendapatan total (*baik dari sektor basis maupun dari sektor non basis*) dengan kenaikan sektor basis pada waktu tertentu.

2.4.3. Analisis Location Quoetion

Model analisis *economic base* yang lain adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas *analisis shift share*. Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self - sufficiency* suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan *industry basic*.
- b. kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal .

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori *economic base* yang intinya adalah : karena *industry basic* menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap *industry basic*, tetapi juga menaikkan permintaan akan *industry non basic* (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan *industry basic* .

Oleh karena itu, *industry basic* - lah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap

industri apakah termasuk *industry basic* atau *non basic*. Untuk keperluan ini dipakai *Location Quotient* (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional .

Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan. Misalnya dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adalah jumlah tenaga kerja yang diserap. Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan daerah, maka ukuran dasar yang dipakai adalah besarnya kenaikan yang diciptakan di daerah. Sedangkan rumus menghitung LQ adalah (Bendavid-Val, 1992) :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t} = \frac{v_i / V_i}{v_t / V_t}$$

Dimana:

v_i adalah pendapatan dari industri di suatu daerah

v_t adalah pendapatan total daerah tersebut

V_i adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional / nasional

V_t adalah pendapatan regional / nasional .

Asumsi teknik ini adalah : pertama, semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor .

Bagaimana menginterpretasikan angka LQ? Andaikata penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri, berarti peranan relatif industri yang bersangkutan dalam daerah adalah sama dengan peranan relatif industri sejenis dalam perekonomian nasional. Berarti juga bahwa LQ di daerah industri A adalah 1 (satu). Kalau LQ lebih besar dari 1 (satu) berarti daerah tersebut dapat "mengeksport" hasil industri tekstil ke daerah lain. Misalkan LQ 1,5 atau $\frac{3}{2}$, artinya $\frac{1}{3}$ hasil industri dapat "dieksport", sedang $\frac{2}{3}$ dikonsumsi daerah yang bersangkutan.

Penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat dipakai untuk menganalisis tentang "ekspor - impor" (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai kelemahan, yaitu :

- a. Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah .
- b. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah berbeda, artinya konsumsi rata-rata bahan pakaian A lebih besar dari 1 (satu) tetapi daerah A "mengimpor" bahan pakaian, sedang daerah B yang LQ industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat "mengeksport" bahan pakaian .
- c. Bahan keperluan industri berbeda antar daerah. Artinya daerah A memakai benang tenun dari kapas, sedang daerah B lebih banyak memakai bahan tenun sintesis. Walaupun industri permintalan kapas daerah A mempunyai LQ lebih besar dari 1 (satu), daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenun dari daerah B yang mungkin industri tekstil di daerah B mempunyai LQ kurang dari 1 (satu) .

2.4.4. Model Ekonometri

Untuk menganalisa perkembangan dan perencanaan pembangunan suatu daerah dapat digunakan cara lain berupa model ekonometri. Meskipun teori ini tidak mendasarkan diri pada teori urban, namun dapat merupakan penggabungan dari model-model sebelumnya (Glickman, 1977). Model ini dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada model basis ekonomi serta hanya memerlukan biaya yang relatif lebih kecil daripada dana yang dikeluarkan untuk membuat model input output .

Karakteristik utama dari model ekonometri untuk menganalisa suatu daerah adalah pada luas pengamatan yang hanya meliputi variabel-variabel di daerah yang bersangkutan saja. Di sini analisa regresi pun juga merupakan alat analisa statistik yang digunakan untuk meramal hubungan antara dua atau lebih kegiatan ekonomi .

Dalam analisa ini model ekonometri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu model ekonometri sederhana (*simple econometric model*) dan model ekonometri serempak (*simultaneous econometric model*). Bentuk persamaan ekonometri sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = f (Z_{kt} , U_t)$$

Dimana:

Y_{it} = variabel endogen ke i dalam waktu t .

Z_{kt} = variabel eksogen ke k dalam waktu t .

U_t = faktor pengganggu (*error*) dalam waktu t .

Bentuk persamaan ekonometri serempak adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = f (Y_{jt}, Z_{kt}, U_t)$$

Dimana:

Y_{jt} = variabel endogen ke j dalam waktu t .

Selain itu untuk menjelaskan peranan sisi penawaran terhadap perkembangan ekonomi dapat digunakan fungsi produksi, di mana barang-barang yang ditawarkan merupakan fungsi dari input dan tingkat teknologi. Secara sederhana fungsi produksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut : $Y = f (K, L, T)$.

Dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglass dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya tingkat pertumbuhan output .

Secara umum dapat disimpulkan bahwa analisa mengenai pembangunan daerah baik ditinjau dari sudut aspek yang dianalisa maupun dari jumlah analisa mengenai persoalan tersebut masih sangat terbatas sekali. Biasanya faktor-faktor yang diperhatikan dalam analisa regional sampai saat ini masih berkisar di sekitar hal-hal seperti; peranan ekspor dan kekayaan alam, pengaruh migrasi, peranan kota-kota besar, pengaruh proses multiplier dan peranan campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah. Jadi, secara singkatnya dapat dikatakan bahwa jumlah berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang telah dianalisa jumlahnya sangat terbatas .

Kelemahan lain dari analisa ekonomi regional saat ini banyak yang berpangkal pada penekanan analisa yang lebih ditujukan pada masalah dan kebijakan pembangunan daerah di negara maju. Kondisi ini berlaku karena perkembangan analisa ekonomi regional merupakan usaha untuk mencari jalan keluar bagi upaya

untuk memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan daerah di negara yang maju. (Sukirno, 1982). Pada akhirnya dalam penerapan di negara sedang berkembang akan terjadi distorsi dan kesenjangan teoritis, sehingga konsep atau teori pembangunan daerah seperti tersebut di atas tidak dapat diterapkan dan diaplikasikan secara optimal di negara sedang berkembang.

2.5. Pendapatan Asli Daerah: Catatan Singkat

Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan daerah salah satunya adalah kebijakan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka kemungkinan daerah tersebut menjadi mandiri atau otonom dalam hal keuangan semakin besar. Namun demikian, harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah (Radianto, 1997). Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dari masing-masing Dati II seluruh Indonesia yang masih rendah. Artinya bahwa PAD masing-masing Dati II tersebut belumj mampu membiayai pengeluaran rutin.

Sumber-sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari lima komponen besar, yaitu PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan/bantuan pemerintah pusat. Pinjaman daerah dan sisa lebih tahun sebelumnya (Nazara, 1997). PAD terdiri dari penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari laba perusahaan atau badan usaha milik daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas dan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini mencakup penerimaan dari penjualan barang bekas dan sisa, bunga simpanan di bank, dan sebagainya. Dari PAD inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu

jumlah dana yang benar-benar menunjukkan kemampuan setiap daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada kecenderungan PAD setiap daerah mengalami peningkatan. Berdasarkan studi Nazara (1997) menunjukkan bahwa proporsi PAD setiap Dati I / Propinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Jika pada tahun anggaran 1984/1985 sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah baru sekitar 17,15% pada tahun anggaran 1994/1995 sudah mencapai 31,01%. Di sisi lain ada kecenderungan bahwa sumbangan/bantuan pemerintah pusat mengalami penurunan. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan, dikarenakan arah menuju otonomi fiskal atau keuangan daerah sudah pada jalur yang semestinya.